

SINOPSIS

Skripsi ini menulis tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ternate dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2005 yang diselenggarakan 27 Juni lalu. Sebagaimana diketahui hasil Pilkada Langsung Kota Ternate, yang juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan konflik, ditolak oleh dua calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota bersama pendukungnya karena dianggap banyak kecurangan. Mantan Walikota Ternate, Syamsir Andili bersama pasangannya Ammas Dinsie yang memenangkan Pilkada Langsung diduga melakukan kerjasama dengan pihak KPUD sebagai penyelenggara dan juga Dinas Kependudukan dalam pendataan pemilih. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana peran KPUD Kota Ternate dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung berjalan sesuai dengan amanat UU no. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 dan faktor pendukung dan penghambat Pilkada Langsung di Kota Ternate.

Untuk penlitiaian ini, Penulis menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif yakni memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan teknik Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Peran KPUD dalam menjalankan tahapan proses pemilihan berjalan lancar, tetapi terdapat kerancuan tugas dari KPUD sendiri, sehingga permasalahan menyangkut data pemilih (1.800 pemilih fiktif, 83 surat suara yang hilang, 34.000 peserta pemilih yang tidak mendapat undangan dan kartu suara dan adanya sejumlah praktik politik uang) tidak dapat di hindari.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa peran KPUD Kota Ternate sebagai penyelenggara Pilkada Langsung telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya tugasnya, hanya saja masih terdapat kendala-kendala yang notabene berasal dari kerjasama antar pihak yang terlibat dalam moment Demokrasi ini, sehingga diharapkan menjadi pelajaran dan tolak ukur kinerja KPUD dalam pelaksanaan Pilkada Langsung kedepannya, KPUD Kota Ternate diharapkan mampu merencanakan suatu persiapan yang matang untuk suatu agenda pemilihan, meningkatkan system koordinasi dan sosialisasi yang menjadi kelemahan dari kerja KPUD Kota Ternate sebagai lembaga